

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 2 minggu, mulai dari tanggal 17 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Calon Apoteker mempunyai strategi dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
3. Calon Apoteker memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
4. Calon Apoteker siap untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Calon Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra selama 2 minggu, mulai dari tanggal 17 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020, maka saran yang diberikan setelah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai Apoteker saat melakukan KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat tetapi juga menyampaikan terapi non farmakologi kepada pasien serta menunjukkan tanggal kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh pasien.
2. Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan kepercayaan diri saat memberikan informasi kepada pasien.
3. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan untuk mampu mempelajari dan memahami berbagai macam obat-obatan dari berbagai kelas terapi supaya wawasan dan pengetahuan tentang obat yang didapatkan lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J., A., Lacy, C., F., Amstron, L., L., Goldman, M., P., and Lance, L., L. *Drug Information Handbook*, 17<sup>th</sup> Edition. New York: American Pharmacist Association, 2009. Print.
- Anonim. *Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia*. Volume 46. Jakarta: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 2010. Print.
- BNF for Children. *The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children*. London: BMJ Group, 2009. Print.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1997. Print.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009. Print.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009. Print.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2014. Print.
- Drugbank. *Open Data Drug & Drug Target Database*, (online) diakses pada 5 September 2020. <https://www.drugbank.ca>
- Gunawan, S.G., Nafrialdi R.S. dan Elysabeth. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi 5. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik, 2012. Print.
- Ikatan Apoteker Indonesia. *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentan*

- Papan Nama Praktik Apoteker*. Surabaya: Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Print.
- McEvoy, G., K. *AHFS Drug Information*. Maryland: American Society of Health System Pharmacists, 2008. Print.
- Medscape. Drug Interaction Checker. (online) diakses pada 5 September 2020. <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*. Jakarta: Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1983. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 tentang Tanda Khusus untuk Obat Keras*. Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1986. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek*. Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1990. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia., 1993. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2*. Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1993. Print.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1*. Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1993. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3*. Jakarta: Keputusan Menteri Kesehatan RI, 1999. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ Menkes/068/ I/ 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2010. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016. Print.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017. Print.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018. Print.
- PerBPOM. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 40 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*. Jakarta: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2013. Print.
- PerBPOM. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan*. Jakarta: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018. Print.
- Perki. *Pedoman Tata Laksana Hipertensi pada Penyakit Kardiovaskular Edisi Pertama*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular, 2015. Print.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Print.
- Tjay, T.H. dan Rahardja, K. *Obat-Obat penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi ke-7. Jakarta: IKAPI, 2015. Print.